



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

Alamat: Jalan PB. Sudirman Denpasar Bali
Telp. (0361) 255378, 255916
Laman: www.fisip.unud.ac.id

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

No. DOKUMEN	TANGGAL TERBIT: 9 Juli 2025	REVISI: 0	JUMLAH HAL: 9
-------------	--------------------------------	--------------	------------------

Nama Mata Kuliah: POLITIK ANTI KORUPSI	Kode Mata Kuliah: 24SLPL04X033	SKS: 3	Rumpun MK: Konsentrasi	Semester: 5	Mata Kuliah Pra-Syarat: -
---	-----------------------------------	-----------	---------------------------	----------------	------------------------------

Koordinator MK: Dr. Piers Andreas Noak, SH.,M.Si.	Anggota Tim Fasilitator: Muhammad Alfian Maulana, S.I.P., M.A. Efatha Filomeno Borromeu Duarte, S.I.P.,M.Sos. Falhan Hakiki, S.I.P., M.I.Pol.	Koordinator Program Studi: Dr. Tedi Erviantono, S.I.P., M.Si	TPPM PS TEP Efatha Filomeno Borromeu Duarte, S.I.P., M.Sos
--	---	---	--

Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah ini merupakan pengantar interdisipliner mengenai teori dan praktik korupsi beserta upaya pemberantasannya. Mahasiswa akan diajak untuk memahami bagaimana berbagai pengertian korupsi dapat mengarahkan pada solusi yang berbeda. Pembahasan akan mencakup definisi, penjelasan, dan metode pengukuran korupsi, serta kaitannya dengan pembangunan, politik, ekonomi, dan budaya. Dengan mengambil pendekatan komparatif dan historis, mata kuliah ini akan mengkaji berbagai dimensi korupsi dari perspektif politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Mahasiswa akan mengevaluasi berbagai upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan di berbagai negara, dengan penekanan khusus pada konteks Indonesia. Tujuannya adalah untuk membangun kemampuan mahasiswa dalam menganalisis masalah korupsi secara mendalam dan merumuskan solusi kebijakan yang relevan untuk membatasinya.
-----------------------	---

CPL yang dibebankan pada Mata Kuliah Capaian Pembelajaran mata kuliah	S3	Mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik serta kepedulian terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
	S5	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
	PU1	Mendemonstrasikan pemahaman tentang konsep-konsep dasar, teori dan metodologi ilmu politik.
	KU1	Mampu menganalisis fenomena politik dan isu-isu kontemporer.
	KK1	Mampu mengambil keputusan-keputusan berbasis bukti dan riset dengan memanfaatkan pengetahuan, penguasaan metodologi, dan kapasitas analisis dalam bidang politik
	Keterangan: CPL : Capaian Pembelajaran Lulusan S : Sikap PU : Pengetahuan Umum KU : Keterampilan umum KK : Keterampilan khusus	

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	CPMK 1	Menunjukkan kepedulian terhadap kehidupan bernegara dengan menginternalisasi nilai, norma, dan etika dalam analisis isu korupsi (S2).
	CPMK 2	Menguasai konsep-konsep dasar, teori, dan pendekatan dalam studi politik korupsi untuk menjelaskan penyebab dan dampaknya (PU1).
	CPMK 3	Mampu menganalisis secara kritis fenomena korupsi sebagai isu kontemporer di berbagai level dan konteks negara (KU1).
	CPMK 4	Mampu memanfaatkan pengetahuan dan kapasitas analisis untuk mengevaluasi strategi anti-korupsi berbasis bukti dan riset (KK1).
	CPMK 5	Menunjukkan sikap bertanggung jawab secara mandiri dalam menghasilkan analisis dan evaluasi yang mendalam mengenai isu anti-korupsi (S5)
Sub-CPMK	Sub-CPMK 1	Menjelaskan ruang lingkup, urgensi, dan relevansi studi politik anti korupsi.
	Sub-CPMK 2	Mengidentifikasi berbagai definisi, tipologi, dan pendekatan dalam mengukur korupsi.
	Sub-CPMK 3	Menjelaskan berbagai teori penyebab korupsi dari berbagai perspektif.
	Sub-CPMK 4	Menganalisis dampak korupsi terhadap politik, demokrasi, dan pembangunan.
	Sub-CPMK 5	Membedah anatomi korupsi di berbagai sektor dan dampaknya terhadap demokrasi.
	Sub-CPMK 6	Membandingkan praktik korupsi dengan kerangka <i>Global South vs Global North</i> .
	Sub-CPMK 7	Menganalisis peran beragam aktor dalam dinamika anti-korupsi.
	Sub-CPMK 8	Mengevaluasi berbagai strategi pemberantasan korupsi, baik melalui pendekatan top-down (hukum dan kelembagaan) maupun bottom-up (gerakan sosial dan pengawasan publik).
	Sub-CPMK 9	Menganalisis dimensi transnasional dari korupsi dan efektivitas kerjasama internasional.

	Sub-CPMK 10	Mengevaluasi inovasi dan peran teknologi dalam gerakan anti-korupsi.
	Sub-CPMK 11	Menganalisis hubungan antara pendanaan politik (<i>political finance</i>) dan korupsi politik.
	Sub-CPMK 12	Mengevaluasi peran kepemimpinan dan <i>political will</i> dalam keberhasilan gerakan anti-korupsi
Bahan Kajian/Materi Ajar	1. Pengantar Politik Anti Korupsi 2. Definisi, Tipologi, dan Pengukuran Korupsi 3. Teori-Teori Penyebab Korupsi 4. Dampak Korupsi 5. Anatomi Korupsi Sektor Publik 6. Studi Kasus Komparatif Korupsi 7. Politik Pemberantasan Korupsi: Peran Aktor 8. Strategi Pemberantasan Korupsi (Top-Down & Bottom-Up) 9. Dimensi Internasional Anti-Korupsi 10. Inovasi dan Teknologi Anti-Korupsi 11. Korupsi dan Pendanaan Politik 12. Kepemimpinan dan <i>Political Will</i>	
Referensi	Utama Johnston, Michael. (2005). <i>Syndromes of Corruption: Wealth, Power, and Democracy</i>. Cambridge University Press. Rose-Ackerman, Susan, & Palifka, Bonnie J. (2016). <i>Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform</i>. Cambridge University Press. Fisman, Raymond, and Miriam A. Golden. (2017). <i>Corruption: What everyone needs to know</i>. Oxford University Press. Holmes, Leslie. (2015). <i>Corruption: A Very Short Introduction</i>. Oxford University Press. Pendukung Rothstein, Bo. (2011). <i>The Quality of Government: Corruption, Social Trust, and Inequality in International Perspective</i>. University of Chicago Press. Svensson, Jakob. (2005). "Eight Questions about Corruption". <i>Journal of Economic Perspectives</i>, 19(3), 19-42. Persson, A., Rothstein, B., & Teorell, J. (2013). "Why Anticorruption Reforms Fail—Systemic Corruption as a Collective Action Problem". <i>Governance</i>, 26(3), 449-471. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berbagai laporan dari Transparency International, World Bank, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).	

Media Pembelajaran	Perangkat Lunak		Perangkat Keras:
	Jaringan Wifi, LAN		
Dosen Pengampu	1	Dr. Piers Andreas Noak, SH.,M.Si. (Koordinator MK)	
	2	Muhammad Alfian Maulana, S.I.P., M.A.	
	3	Efatha Filomeno Borromeu Duarte, S.IP.,M.Sos.	
	4	Falhan Hakiki, S.IP., M.I.Pol.	

Sesi	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir & Materi)	Bahan Kajian	Strategi/Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu	Indikator Capaian	Instrumen Penilaian	Bobot	Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sub-CPMK 1 Kontrak kuliah & pengantar ruang lingkup kajian politik anti korupsi.	1. RPS & Kontrak Kuliah 2. Urgensi studi anti korupsi	1. Pemaparan dan diskusi kelas 2. Tanya jawab kelompok 3. Refleksi awal	1. 3x50' 2. 3x60' 3. 3x60'	Memahami ruang lingkup dan tujuan mata kuliah.	1. Kehadiran 2. Partisipasi aktif 3. Catatan refleksi awal	5%	Pendidikan Antikorupsi untuk PT. Edisi Revisi, Kemenristek dikti, Sep 2018.
2	Sub-CPMK 2 Mengidentifikasi berbagai definisi, tipologi, dan pendekatan dalam mengukur korupsi.	1. Definisi & Tipologi Korupsi 2. Indeks Persepsi Korupsi 3. Metode Pengukuran Lainnya	1. Diskusi literatur 2. Paparan visual 3. Tugas ringkasan individu	1. 3x50' 2. 3x60' 3. 3x60'	Mampu menjelaskan konsep dan metode pengukuran korupsi.	1. Pengumpulan tugas ringkasan 2. Keaktifan dalam diskusi 3. Jawaban lisan di kelas	5%	H. Moh Askin, Penerapan Hukum dan strategi Anti Korupsi. Studi Kasus BLBI. Holmes (2015)

3	Sub-CPMK 3 Menjelaskan berbagai teori penyebab korupsi.	1. Perspektif Ekonomi 2. Perspektif Politik 3. Perspektif Sosial & Budaya	1. Ceramah 2. Studi kasus 3. Debat terstruktur	1. 3x50' 2. 3x60' 3. 3x60'	Mampu menganalisis faktor-faktor penyebab korupsi secara multidisipliner.	1. Kualitas materi presentasi 2. Kemampuan argumentasi 3. Partisipasi dalam sesi debat	5%	Lilik Mulyadi, Kembang Setaman Tindak Pidana Korupsi. 2022. Rose-Ackerman, & Palifka (2016)
4	Sub-CPMK 4 Menganalisis dampak korupsi terhadap politik, demokrasi, dan pembangunan.	1. Dampak Ekonomi & Pembangunan 2. Dampak Politik &	1. Diskusi interaktif 2. Analisis data 3. Penugasan analisis singkat	1. 3x50' 2. 3x60' 3. 3x60'	Mampu menjelaskan dampak multidimensional dari korupsi.	1. Laporan ringkas analisis data 2. Kuis singkat 3. Partisipasi dalam diskusi	5%	Svensson (2005)
		Demokrasi 3. Dampak Kesejahteraan Sosial						
5	Sub-CPMK 5 Membedah anatomi korupsi di berbagai sektor.	1. Korupsi Birokrasi & Politik 2. Korupsi Sektor Swasta 3. Studi Kasus Skandal Korupsi	1. Diskusi literatur 2. Tugas reflektif 3. Pemaparan studi kasus	1. 3x50' 2. 3x60' 3. 3x60'	Mampu mengidentifikasi modus operandi korupsi di berbagai sektor.	1. Esai reflektif 2. Analisis studi kasus 3. Keaktifan dalam kelas	5%	Romly Atmasasm ita, Pemberantasan korupsi di Indonesia. 2016. Fisman, & Golden (2017)

6	Sub-CPMK 6 Membandingkan praktik korupsi dengan kerangka <i>Global South vs Global North</i> .	1. Korupsi di Negara Maju 2. Korupsi di Negara Berkembang 3. Sindrom-sindrom Korupsi	1. Kajian historis-komparatif 2. Diskusi film dokumenter 3. Esai singkat	1. 3x50' 2. 3x60' 3. 3x60'	Mampu membedakan karakteristik dan sindrom korupsi lintas negara.	1. Tugas esai komparatif 2. Presentasi temuan 3. Partisipasi dalam diskusi	5%	Johnston (2005)
7	Sub-CPMK 7 Menganalisis peran beragam aktor dalam dinamika anti-korupsi.	1. Peran Masyarakat Sipil & Media 2. Peran Sektor Swasta 3. Koalisi Anti-Korupsi	1. Simulasi pemetaan aktor 2. Diskusi literatur 3. Tugas analisis studi kasus	1. 3x50' 2. 3x60' 3. 3x60'	Mampu menganalisis peran dan interaksi para aktor dalam politik anti-korupsi.	1. Laporan studi kasus 2. Performa dalam simulasi 3. Umpan balik lisan	5%	Persson, et al. (2013)
Ujian Tengah Semester (Bobot 25%)								
9	Sub-CPMK 8 Mengevaluasi berbagai strategi pemberantasan korupsi (Bagian 1: Top-Down).	1. Lembaga Anti-Korupsi (KPK) 2. Penegakan Hukum & UU Tipikor 3. Reformasi Birokrasi	1. Kuliah Tamu (jika memungkinkan) 2. Komparasi wacana hukum 3. Infografis kelompok	1. 3x50' 2. 3x60' 3. 3x60'	Mampu menjelaskan dan mengevaluasi pendekatan hukum & kelembagaan (Top-Down).	1. Produk visual (infografis) 2. Partisipasi diskusi 3. Laporan kelompok	5%	UU Tipikor
10	Sub-CPMK 8	1. Gerakan Sosial	1. Diskusi lintas negara	1. 3x50'	Mampu	1. Tabel	5%	Rothstein
	Mengevaluasi berbagai strategi pemberantasan korupsi (Bagian 2: Bottom-Up).	Anti-Korupsi 2. Jurnalisme Investigatif 3. Pengawasan oleh Publik	2. Tugas matriks komparasi 3. Umpan balik kelompok	2. 3x60' 3. 3x60'	membandingkan secara sistematis berbagai strategi reformasi non-negara (Bottom-Up).	perbandingan 2. Keaktifan dalam diskusi 3. Analisis gerakan sosial		(2011)

11	Sub-CPMK 9 Menganalisis dimensi transnasional dari korupsi.	1. Aliran Dana Ilegal 2. Kerjasama Internasional (UNCAC) 3. Korupsi sebagai Masalah Global	1. Simulasi negosiasi 2. Tugas posisi kebijakan (memo) 3. Kajian dokumen internasional	1. 3x50' 2. 3x60' 3. 3x60'	Mampu mengevaluasi dinamika korupsi transnasional dan kerja sama internasional.	1. Policy memo 2. Performa dalam simulasi 3. Presentasi singkat	5%	Anantawik rama Tungga Atmadja, Sosiologi Korupsi. 2019. Rose-Ackerman, & Palifka (2016)
12	Sub-CPMK 10 Mengevaluasi inovasi dan peran teknologi dalam gerakan anti-korupsi.	1. Inovasi Anti-Korupsi 2. Peran Big Data & AI 3. Teknologi Digital & Media	1. Kajian studi kasus inovasi 2. Forum diskusi terbuka 3. Tugas mini-research	1. 3x50' 2. 3x60' 3. 3x60'	Mampu mengevaluasi tantangan kontemporer dan inovasi dalam gerakan anti-korupsi.	1. Makalah mini-research 2. Kualitas argumen diskusi 3. Pitching ide inovasi	5%	Laporan KPK
13	Sub-CPMK 11 Menganalisis hubungan antara pendanaan politik (political finance) dan korupsi.	1. Korupsi Politik & Political Finance 2. Regulasi Dana Kampanye 3. Studi Kasus di Indonesia	1. Diskusi literatur 2. Analisis komparatif regulasi 3. Studi kasus	1. 3x50' 2. 3x60' 3. 3x60'	Mampu menjelaskan keterkaitan antara pendanaan politik dan praktik korupsi.	1. Tugas analisis kasus 2. Partisipasi aktif 3. Kuis singkat	5%	Rose-Ackerman, & Palifka (2016)
14	Sub-CPMK 12 Mengevaluasi peran kepemimpinan dan political will.	1. Konsep Political Will 2. Peran "Anti-Corruption Champions" 3. Studi Biografi Pemimpin	1. Studi biografi kritis 2. Debat terbuka 3. Analisis wacana media	1. 3x50' 2. 3x60' 3. 3x60'	Mampu menganalisis faktor kepemimpinan dalam keberhasilan pemberantasan korupsi.	1. Esai analisis tokoh 2. Performa dalam debat 3. Partisipasi dalam diskusi	5%	Johnston (2005)
15	Presentasi Analisis Studi Kasus	1. Presentasi hasil analisis kelompok	1. Presentasi kelompok	1. 3x50' 2. 3x60'	Mampu menyajikan analisis berbasis riset	1. Kualitas materi	5%	-

		2. Penerapan teori pada kasus 3. Sesi diskusi dan umpan balik	2. Diskusi terbuka 3. Peer review	3. 3x60'	secara sistematis dan komunikatif.	presentasi 2. Kedalaman analisis kasus 3. Kemampuan berdiskusi		
--	--	--	--------------------------------------	----------	------------------------------------	--	--	--

Ujian Akhir Semester (Bobot 25%)

ASSESSMENT

No.	Komponen Penilaian	Bobot (%)
Penilaian Hasil		
1.	Ujian Tengah Semester (UTS)	25 %
2.	Ujian Akhir Semester (UAS)	25%
Penilaian Proses		
1.	Tugas Individu	20%
2.	Tugas Kelompok dan Presentasekelas	20%
3.	Keaktifan Kelas dan Kehadiran	10%
Total		100%

Skala Penilaian	
80-100	A
70-<80	B+
65-<70	B
60-<65	C+
55-<60	C
45-<55	D
<45	E

NORMA AKADEMIK

- Toleransi Keterlambatan Kehadiran
Mahasiswa diizinkan terlambat masuk ke dalam perkuliahan dengan batas waktu maksimal 10 menit sejak jadwal dimulai. Keterlambatan melebihi waktu tersebut dapat dianggap tidak hadir atau dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Pengumpulan Tugas
Tugas, baik individu maupun kelompok, wajib diserahkan tepat waktu sesuai tenggat (deadline) yang telah ditetapkan. Apabila tugas diserahkan terlambat, maka akan dikenakan pengurangan nilai sebesar 10 poin untuk setiap hari keterlambatan. Sebagai contoh, keterlambatan satu hari akan mengurangi 10 poin, dua hari 20 poin, dan seterusnya.
- Ketidakhadiran
Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan karena sakit wajib menyertakan surat keterangan (misalnya dokter). Surat tersebut harus diserahkan paling lambat pada saat mahasiswa kembali mengikuti perkuliahan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini dapat memengaruhi status kehadiran atau penilaian.
- Larangan Plagiarisme

	Segala bentuk plagiarisme dalam tugas individu maupun kelompok dilarang keras. Tugas yang terbukti hasil plagiarisme akan diberikan nilai nol (0) sebagai sanksi akademik, tanpa terkecuali. • Kecurangan dalam Ujian Mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan selama ujian, seperti mencontek atau menggunakan bahan yang tidak diizinkan, akan mendapatkan nilai nol (0) untuk ujian tersebut sebagai bentuk sanksi tegas. • Ketentuan Tambahan Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan akademik ini akan ditentukan lebih lanjut sesuai dengan kebijakan atau peraturan yang berlaku di Program Studi Ilmu Politik Universitas Udayana
--	--

Penelaah
Ketua UP3M Program Studi


Efatha Filomeno Borromeu Duarte, S.IP., M.Sos

Penyusun RPS


Piers Andreas Noak.

Disahkan oleh
Koordinator Program Studi Ilmu Politik


Dr. Tedi Erviantono, S.IP., M.Si.